

**ANALISIS HUBUNGAN PENGUASAAN LAHAN DAN POLA BAGI HASIL  
DENGAN TINGKAT KEMISKINAN PETANI PENGGARAP**  
*ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF LAND TENURE AND PRODUCTION  
SHARING PATTERNS WITH THE POVERTY LEVEL OF CHARGERS*

**Abdul Halim & Muhammad Faisal**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia  
Email: faisalmile69ipdn.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dengan kuesioner. Responden adalah 396 petani yang diambil dengan teknik proporsional random sampling. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Uji hipotesis dengan statistik Spearman Rank. Ada hubungan yang signifikan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan. Dengan pola penguasaan lahan dan bagi hasil saat ini, ternyata sebagian besar petani penggarap di Kabupaten Maros rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan yang memungkinkan petani penggarap yang rentan miskin ini tidak menjadi miskin dengan pemanfaatan lahan yang tersedia, serta skema bagi hasil yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

**Kata Kunci:** Kepemilikan tanah, pola bagi hasil, tingkat kemiskinan, petani penggarap

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the relationship between land tenure and profit sharing patterns with the poverty level smallholder farmers using a quantitative approach. Data obtained by questionnaire. The respondents were 396 farmers who were taken by proportionate random sampling technique. Data analysis using SPSS application version 23. Test the hypothesis with Spearman Rank statistics. There is a significant relationship between land tenure and profit sharing patterns with poverty levels. With the current land tenure and production sharing patterns, it turns out that most of the tenants in Maros Regency are vulnerable to poverty. For this reason, it is necessary to have regulations and policies that enable these vulnerable poor tenants not to become poor with the use of available land, as well as mutually beneficial profit sharing schemes between land owners and smallholders.*

**Key Words:** Land tenure, profit sharing pattern, poverty levels, harecroppers

**PENDAHULUAN**

Padi (beras) merupakan komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Selatan di samping jagung, kakao, udang, rumput laut, dan sapi. Penetapan komoditi unggulan tersebut, tentunya tidak terlepas dari potensi yang dimiliki daerah ini yang meliputi 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan. Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu daerah sentra pengembangan

padi utama di luar Jawa. Bahkan, Pemerintah pusat pernah memberikan predikat kepada Sulawesi Selatan sebagai daerah lumbung pangan nasional. (BPS, 2018c) mencatat produksi padi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 5.471.806 ton atau 7,26% dari produksi nasional, berada pada urutan keempat tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia, di bawah Provinsi Jawa Timur (13.154.967 ton), Jawa Barat (11.373.144 ton), dan Jawa Tengah (11.301.422 ton).

Terdapat beberapa wilayah yang potensial untuk pengembangan padi di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Kabupaten Maros. Hampir seluruh wilayah dataran di Kabupaten Maros bisa ditanami padi. Luas wilayah Kabupaten Maros tercatat 1.619,12 km<sup>2</sup> (BPS-Maros, 2019), terdiri atas 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Dari 103 desa/kelurahan tersebut, ternyata 10 desa adalah daerah pesisir pantai, 5 desa merupakan kawasan lembah, 28 desa berupa lereng/bukit, dan 60 desa adalah dataran. Wilayah Kabupaten Maros berada pada kisaran ketinggian 0-881 m di atas permukaan laut (dpl).

Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 319.008 jiwa. Data 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Maros. Berturut-turut pada tahun 2014 sebanyak 335.596 jiwa, tahun 2015 sebanyak 339.300 jiwa, dan tahun 2016 sebanyak 342.890 jiwa (BPS-Maros, 2019). Artinya, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014-2015 sebesar 1,10 per tahun dan selanjutnya tahun 2015-2016 sebesar 1,06% per tahun. Khusus data tahun 2016, dari jumlah penduduk sebanyak 342.890 jiwa, terdiri atas 167.724 jiwa (48,91%) adalah laki-laki dan 175.166 jiwa (51,09%) adalah perempuan.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Maros pada tahun 2015 berjumlah 155.988 jiwa. Dari seluruh penduduk angkatan kerja ini, 145.081 jiwa penduduk yang sedang bekerja dan 10.907 jiwa pengangguran. Tidak kurang dari 32% penduduk yang sedang bekerja tersebut memilih sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai sumber mata pencaharian utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Artinya, sektor pertanian di Kabupaten Maros merupakan penyerap tenaga kerja terbesar (31,89%), diikuti sektor perdagangan (21,74%), sektor jasa kemasyarakatan (17,51%), industri pengolahan (12,90%), dan sektor-sektor lainnya (15,96%).

Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Maros, juga dapat dilihat dari distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Dari 21 jenis lapangan usaha, ternyata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Maros sebesar 15,25% atau berada pada urutan ketiga tertinggi, dibawah kontribusi sektor transportasi dan pergudangan sebesar 41,79%, serta kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 18,14%. PDRB Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 11.970.398,03 juta rupiah. Kontribusi sektor pertanian ini tidak terlepas dari ketersediaan lahan sawah, baik sawah irigasi maupun sawah non irigasi.

Lahan sawah di Kabupaten Maros secara keseluruhan seluas 26.071 ha, meliputi lahan sawah irigasi seluas 15.657 ha dan lahan sawah non irigasi seluas 10.415 ha. Produksi padi sawah Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 436.730,26 ton yang dipanen dari areal seluas 58.437 ha atau rata-rata 7,22 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah di Kabupaten Maros pada 14 kecamatan berkisar antara 6,13-8,96 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah tersebut, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas padi sawah Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir (2011-2015) yaitu sebesar 5,07-5,24 ton/ha dan produktivitas padi nasional sebesar 4,98-5,34 ton/ha. Produksi dan produktivitas yang cukup tinggi ini ditopang oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendukung yang cukup memadai. Di Kabupaten Maros, terdapat lembaga penelitian tanaman pangan di bawah naungan Kementerian Pertanian yang sangat membantu dalam perakitan teknologi produksi, mulai dari awal panen hingga pasca panen.

Dukungan lainnya adalah keberadaan produsen benih dan pupuk di daerah ini. Kebutuhan benih padi bermutu dipasok oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) di Kabupaten Maros. Selanjutnya, kebutuhan pupuk bersubsidi disuplai oleh PT. Pupuk Indonesia

(Persero). Hal tersebut tidak terlepas dari fasilitasi dan dukungan Pemerintah Daerah, termasuk dukungan pelaku utama usaha tani di lahan sawah yaitu petani beserta keluarganya.

Permasalahan utama yang dihadapi terkait hal ini adalah capaian produktivitas padi sawah yang cukup tinggi tersebut (6,13-8,96 ton/ha), belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Padahal diketahui peningkatan pendapatan rumah tangga dapat ditempuh melalui upaya memproduktifkan seluruh sumber daya ada dalam keluarga (Handayani, Jamhari, Waluyati, & Mulyo, 2019). Tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2014-2016) adalah tahun 2014 sebanyak 40.130 jiwa, tahun 2015 sebanyak 40.080 jiwa, dan tahun 2016 sebanyak 39.020 jiwa. Berdasarkan data ini tampak jelas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros, penurunannya relatif stagnan. Bahkan, bisa dikatakan meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, namun penurunannya sangat kecil (tidak signifikan). Penduduk miskin yang jumlahnya relatif stagnan di Kabupaten Maros tersebut, didominasi oleh petani yang bermukim di pedesaan (BPS-Maros, 2019).

Berdasarkan fenomena ini dapat dikemukakan bahwa produktivitas padi sawah yang cukup tinggi, ternyata belum sepenuhnya berimplikasi positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Maros. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Perum Bulog telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi, di antaranya adalah dengan perbaikan harga gabah (beras). Namun kenyataannya, selama ini petani tetap saja tidak beranjak dari belunggu kemiskinan. Salah satu faktor yang dianggap memiliki kontribusi cukup besar sebagai penyebab terjadinya hal ini adalah penguasaan lahan sawah petani. Selama ini, kebanyakan petani mengusahakan lahan sawah dengan luasan kurang dari 0,50 ha. Bagi petani,

tanah merupakan sumber produksi pangan dan kelangsungan hidup (Faisal, 2020). Menurut data (BPS, 2018b), secara nasional, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) yaitu: (a) skala kecil dengan luas lahan usaha tani kurang dari 0,50 ha adalah sebanyak 9.869.797 RTUP (75,93 persen); (b) skala menengah dengan luas lahan usaha tani 0,50-0,99 ha adalah sebanyak 1.996.580 RTUP (15,36 persen); dan (c) skala luas dengan luas lahan usaha tani 1,00 ha atau lebih adalah sebanyak 1.132.522 RTUP (8,71 persen).

Kecenderungan penguasaan lahan sawah RTUP secara nasional tersebut, kondisinya tidak jauh berbeda dengan RTUP di Sulawesi Selatan, yaitu: (a) skala kecil dengan luas lahan usaha tani kurang dari 0,50 ha adalah sebanyak 300.117 RTUP (50,21 persen); (b) skala menengah dengan luas lahan usaha tani 0,50-0,99 ha adalah sebanyak 1.996.580 RTUP (25,28 persen); dan (c) skala luas dengan luas lahan usaha tani 1,00 ha atau lebih adalah sebanyak 146.549 RTUP (24,52 persen). Kondisi RTUP yang kebanyakan menguasai lahan usaha tani kurang dari 0,50 ha, ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab masih maraknya kemiskinan petani di pedesaan.

Status serta luas penguasaan lahan memiliki andil terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga petani (Ginting, 2004); (Mufti & Zargustin, 2018); (Manatar, Laoh, & Mandei, 2017). Faktanya, sebagian petani ada yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap. Jumlah petani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap mencapai 19,5 persen di Jawa dan 17,3 persen di luar Jawa (Susilowati & Maulana, 2012) therefore, is very important. This paper aims at analyzing the minimum requirements of farm land size and its break- even point (BEP. Banyaknya RTUP yang menguasai lahan sempit (kurang dari 0,5 ha) dan bahkan ada yang tidak memiliki lahan sama sekali dipicu oleh beberapa faktor yang saling terkait.

Menurut (Winarso, 2012), faktor penyebab terjadinya permasalahan penguasaan

lahan yang sempit dan bahkan tidak ada lahan sama sekali adalah adanya sistem waris pecah-bagi. Dengan sistem waris tersebut, lahan yang dimiliki petani dari satu generasi ke generasi berikutnya akan semakin sempit. Pada luasan tertentu, petani yang memiliki lahan sempit cenderung akan menjual lahannya karena pendapatan yang diperoleh dari lahan yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Bagi petani yang memiliki lahan sendiri untuk digarap (biasa disebut petani pemilik penggarap), akan memperoleh seluruh hasil produksinya pada saat panen. Status kepemilikan lahan yang jelas akan meningkatkan efisiensi pemakaian lahan (Ala, 2012). Hal ini berbeda kasusnya bila petani tidak memiliki lahan sawah sendiri untuk digarap. Pada kasus ini, petani diperhadapkan pada pilihan yang dilematis. Bila petani memilih untuk tidak menggarap lahan sawah milik orang lain, berarti petani tersebut tidak berusaha tani. Dalam kondisi tidak berusaha tani berarti penghidupan petani beserta keluarganya akan terganggu. Di sisi lain, bila petani memilih untuk menggarap lahan sawah milik orang lain (biasa disebut petani penggarap), berarti petani tersebut harus siap berbagi hasil dengan pemilik lahan.

Posisi petani yang tidak menguasai lahan yang luas memiliki akses terhadap sumber daya lahan yang terbatas. Ini dapat berimplikasi pada tingkatan pendapatan petani. Dengan luas lahan yang semakin sempit, pendapatan yang diperoleh petani semakin kecil (Soekartawi, 2006); (Handayani et al., 2019). Petani penggarap dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung menerima tawaran dari pemilik lahan. Apalagi mereka selain diikat oleh hubungan darah, pertemanan, dan kedekatan lokasi lahan yang selama ini diolah oleh petani penggarap. Perjanjian kerja sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan dalam hal pola bagi hasil (umumnya tidak tertulis), tidak jarang merugikan pihak petani penggarap. Akibatnya, pola bagi hasil yang diterapkan

cenderung tidak seimbang dan umumnya hanya keputusan sepihak dari pemilik lahan. Petani penggarap tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah pola bagi hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa petani penggarap memperoleh bagian hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang digunakan dalam pengelolaan usaha tani pada setiap musim tanam (Irmayanti, 2010); (Priyadi & Ash Shidiqie, 2015); (Mokodongan, Rauf, & Laapo, 2016); (Auliyah & Wulandari, 2017). Bila petani penggarap tidak mematuhi keputusan pemilik lahan dalam hal bagi hasil, secara otomatis pemilik lahan akan mengalihkan hak penguasaan lahan sawahnya untuk digarap oleh petani yang lain. Hal ini menjelaskan betapa lemahnya posisi tawar menawar dari petani penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri. Mereka ini, oleh (Suyanto, 2013) menyebutkan sebagai golongan yang menderita kemiskinan struktural. Dengan posisi tawar menawar yang lemah dan ketidakberdayaan para petani penggarap yang menderita kemiskinan struktural tersebut menjadi sasaran dari perlakuan yang tidak adil dan merugikan mereka (Suyanto, 2013).

Fenomena penguasaan lahan dan bagi hasil sebagaimana diuraikan di atas, serta keeratan hubungannya dengan tingkat kemiskinan petani penggarap di Kabupaten Maros selama ini belum banyak diteliti dan dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dan menganalisis hubungan penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap di Kabupaten Maros.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data variabel penelitian diperoleh melalui instrumen berupa kuesioner. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *proportionate random sampling* dari populasi

sebanyak 33.382 petani yang terdaftar secara resmi sebagai anggota kelompok tani di Kabupaten Maros. Dengan menggunakan rumus  $n = \frac{N \cdot d}{N}$  (Yamane, 1967),  $n$  = Jumlah sampel,  $N$  = Jumlah populasi, dan  $d$  adalah presisi sebesar 5%, diperoleh sampel 396 responden dari 33.382 populasi. Usia responden pada rentang 21-69 tahun, tingkat pendidikan bervariasi dari tidak pernah mengenyam pendidikan formal sampai lulus S1 perguruan tinggi. Sementara itu, jumlah tanggungan keluarga 0-9 orang dan pengalaman berusahatani dari 2-50 tahun. Uji hipotesis menggunakan uji statistik *Rank Spearman* dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23 (Martono, 2010).

Variabel-variabel penelitian ini adalah penguasaan lahan, bagi hasil dan tingkat kemiskinan petani penggarap yang secara operasional didefinisikan sebagai berikut:

- (i) Penguasaan lahan didefinisikan sebagai rata-rata luas areal lahan sawah yang dikuasai oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil untuk setiap musim tanam. Penguasaan lahan sawah petani penggarap tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Skala kecil, petani penggarap dengan rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai setiap musim tanam 0,50 ha; (2) Skala menengah, petani penggarap dengan rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai setiap musim tanam adalah 0,50- 0,99 ha; serta (3) Skala luas, petani penggarap dengan rata-rata luas sawah yang dikuasai adalah 1,00 ha.
- (ii) Bagi hasil adalah pengalihan hak garap atas lahan dari pemilik lahan kepada orang lain (petani penggarap) karena antara pemilik lahan dengan petani penggarap terjadi ikatan perusahaan usaha tani dan pembagian produksi. Bagi hasil terbagi dalam 3 (tiga) tipe, masing-masing adalah: (1) Bagi hasil tipe I, yaitu bagi hasil dengan kategori

tidak proporsional (TP), dalam hal ini bentuk pembagiannya adalah hasil produksi dibagi dua masing-masing 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik lahan (50%:50%), tetapi semua biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap; (2) Bagi hasil tipe II: yaitu bagi hasil yang mendekati proporsional (MP), bentuk pembagiannya adalah hasil produksi dibagi dua masing-masing 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik lahan (50%:50%), biaya pupuk dibagi dua, namun biaya-biaya produksi lainnya ditanggung oleh petani penggarap; serta (3) Bagi hasil tipe III, yaitu bagi hasil yang proporsional (P), bentuk pembagiannya adalah hasil produksi dan biaya produksi masing-masing dibagi dua, 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik lahan (50%:50%).

- (iii) Tingkat kemiskinan petani penggarap adalah tingkat ketidakmampuan petani dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (makanan dan bukan makanan), yang diukur berdasarkan standar kemiskinan BPS yaitu Garis Kemiskinan (GK). (Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, Syarief, & Sukandar, 2015) menyatakan nilai GK berbeda antar daerah dan antar desa-kota. Nilai GK Kabupaten Maros pada keadaan September 2018 adalah Rp 348.726/kapita/bulan (BPS, 2018a). Terkait dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan petani penggarap dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Miskin, bila pendapatan bersih petani penggarap per bulan  $\bar{1},0$  GK; (2) Rentan miskin, bila pendapatan bersih petani penggarap per bulan antara 1,0-1,6 GK; serta (3) Tidak Miskin, bila pendapatan bersih petani penggarap per bulan  $\bar{1},6$  GK.

Instrumen penguasaan lahan dikembangkan berdasarkan definisi operasional yaitu terkait dengan rata-rata luas areal lahan sawah yang dikuasai oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil untuk setiap musim tanam. Penguasaan lahan sawah petani penggarap ini dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (a) Skala kecil, (b) Skala menengah, dan (c) Skala luas. Alternatif pilihan respondennya adalah (a) Skala kecil (Skor 1); atau (b) Skala menengah (Skor 2); atau (c) Skala luas (Skor 3). Selanjutnya, bagi hasil dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (a) Bagi hasil tipe I; (b) Bagi hasil tipe II; dan (c) Bagi hasil tipe III. Alternatif pilihan respondennya adalah (a) Bagi hasil tipe I (skor 1); atau (b) Bagi hasil tipe II (skor 2); atau (c) Bagi hasil tipe III (skor 3). Instrumen tingkat kemiskinan petani penggarap berdasarkan standar kriteria kemiskinan BPS yaitu Garis Kemiskinan (GK), dimana GK Kabupaten Maros pada keadaan September 2018 adalah Rp348.726/kapita/bulan (BPS, 2018a). Tingkat kemiskinan petani penggarap diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha tani padi dengan Garis Kemiskinan (GK), dalam hal ini dibagi 3 (tiga) kategori, yaitu: (a) 1,0 GK; (b) 1,0-1,6 GK; dan (c) 1,6 GK. Alternatif pilihan respondennya adalah (a) 1,0 GK (skor 1); atau (b) 1,0-1,6 GK (skor 2); atau (c) 1,6 GK (skor 3).

### Sekilas Kabupaten Maros Sebagai Lokasi Penelitian

Kabupaten Maros terdiri atas 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.619,12 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 342.890 jiwa (BPS-Maros, 2019). Penduduk Kabupaten Maros dominan bekerja di sektor pertanian (31,89%), kemudian diikuti sektor perdagangan (21,74%), sektor jasa kemasyarakatan (17,51%), industri pengolahan (12,90%), dan sektor-sektor lainnya (15,96%). Dari 21 jenis lapangan usaha, ternyata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten

Maros sebesar 15,25% atau berada pada urutan ketiga tertinggi, di bawah kontribusi sektor transportasi dan pergudangan sebesar 41,79%, serta kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 18,14%. Kontribusi sektor pertanian yang cukup besar ini tidak terlepas dari ketersediaan lahan sawah, baik sawah irigasi (15.657 ha) maupun sawah non irigasi (10.415 ha).

Produksi padi sawah Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 436.730,26 ton yang dipanen dari areal seluas 58.437 ha atau rata-rata 7,22 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah di Kabupaten Maros pada 14 kecamatan berkisar antara 6,13-8,96 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah tersebut, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas padi sawah Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir (2011-2015) yaitu sebesar 5,07-5,24 ton/ha dan produktivitas padi nasional sebesar 4,98-5,34 ton/ha. Capaian produktivitas yang cukup tinggi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. (BPS-Maros, 2017) mencatat bahwa dari 39.020 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Maros, ternyata 28,58% diantaranya adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, selebihnya 46,81% tidak bekerja dan 24,61% bekerja bukan di sektor pertanian.

### Karakteristik Responden Petani Penggarap

Karakteristik responden petani penggarap di Kabupaten Maros bervariasi, baik dari segi umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani padi, serta jumlah tanggungan keluarga. Adapun karakteristik umur dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Karakteristik Umur Responden Petani Penggarap

Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
Lebih dari 58	59	14,90
35 - 58	304	76,77
Kurang dari 35	33	8,33
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa umur responden petani penggarap yang terbanyak berada pada kelompok umur 35-58 tahun sebesar 76,77 persen. Dengan kelompok umur tersebut mereka memiliki kondisi fisik yang memadai sehingga mereka lebih produktif dalam berusaha tani. Sementara itu, karakteristik tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2.** Karakteristik Lamanya Menempuh Pendidikan Formal Responden Petani Penggarap

Lama Menempuh Pendidikan Formal (Tahun)	Jumlah	Persentase
Lebih dari 12 Tahun	9	2,27
Antara 7 – 12 Tahun	147	37,12
Kurang dari 7 Tahun	240	60,61
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Lama menempuh pendidikan formal dari responden petani penggarap pada Tabel 2 di atas adalah kurang dari 7 tahun sebanyak 240 responden atau 60,61 persen. Sementara yang lebih dari 12 tahun hanya 9 responden atau 2,27 persen. Ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan responden petani penggarap kebanyakan hanya tamat di bangku sekolah dasar atau bahkan tidak menyelesaikan pendidikan formalnya di tingkat SD. Dengan demikian dilihat dari tingkat pendidikan formal responden petani penggarap memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Menurut (Arsyad, 2012), petani yang berpendidikan minimal SMA memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan petani dengan tingkat pendidikan yang hanya sampai SMP. Selanjutnya, pengalaman berusahatani padi dari responden dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.** Karakteristik Pengalaman Berusahatani Padi Responden Petani Penggarap

Pengalaman Berusahatani Padi	Jumlah	Persentase
Lebih dari 20 tahun	231	58,33
Antara 10 – 20 tahun	132	33,34
Kurang dari 20 tahun	33	8,33
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Dapat dilihat pada Tabel 3 di atas bahwa pengalaman berusahatani padi dari responden petani penggarap sebesar 58,33 persen sudah lebih dari 20 tahun. Ini menjelaskan bahwa responden petani penggarap sudah berpengalaman dalam mengolah usahatani padi mereka. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh petani penggarap tersebut mereka sudah mempunyai banyak pilihan mulai dari prapanen sampai pascapanen. Lebih jauh, jumlah tanggungan keluarga dari para responden juga menjadi perhatian dalam penelitian ini sebagaimana tampak pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4.** Jumlah Tanggungan Keluarga dari Responden Petani Penggarap

Tanggungan Keluarga	Jumlah	Persentase
Lebih dari 5 orang	70	17,68
Antara 3 – 5 orang	282	71,21
Kurang dari 3 orang	44	11,11
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa para responden petani penggarap sebesar 282 atau 71,21 persen memiliki jumlah tanggungan keluarga antara 3 sampai dengan 5 orang. Demikian juga ada 17,68 persen yang memiliki jumlah tanggungan keluarga lebih dari 5 orang. Dan sisanya hanya 11,11 persen yang memiliki jumlah tanggungan keluarga kurang dari 3 orang. Ini menjelaskan bahwa para responden petani penggarap memiliki jumlah keluarga yang relatif besar. Jumlah tanggungan keluarga

ini, bisa sebagai beban pembiayaan bagi keluarga, namun bisa juga sebagai potensi yang dapat memberikan kontribusi bagi tambahan penghasilan keluarga ketika usianya termasuk usia produktif.

**Deskripsi Penguasaan Lahan**

Distribusi responden petani penggarap berdasarkan tingkat penguasaan lahan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5.** Distribusi Responden Petani Penggarap Menurut Penguasaan Lahan

Penguasaan Lahan (Hektar)	Jumlah	Persentase
≥ 1,00	77	19,45
0,50 – 0,99	168	42,42
0,50	151	38,13
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 168 dari 396 atau 42,42 persen responden petani penggarap yang menguasai lahan 0,50-0,99 hektar dan sebanyak 151 atau 38,13 responden yang menguasai lahan hanya kurang dari setengah hektar. Sementara hanya 19,45 persen yang menguasai lahan lebih atau sama dengan 1 hektar.

Selanjutnya, proporsi pola bagi hasil yang diterapkan disajikan dalam Tabel 6 berikut ini.

**Tabel 6.** Distribusi Responden Petani Penggarap Menurut Pola Bagi Hasil yang Diterapkan

Pola Bagi Hasil yang Diterapkan	Jumlah	Persen tase
Bagi Hasil Proporsional	25	6,31
Bagi Hasil Mendekati proporsional	303	76,52
Bagi Hasil Tidak Proporsional	68	17,17
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Dapat dilihat pada Tabel 6 di atas bahwa sebanyak 303 dari 396 responden petani

penggarap atau 76,52 persen pola bagi hasil yang diterapkan adalah bagi hasil mendekati proporsional dan hanya 25 dari 396 responden atau 6,31 persen yang menerapkan bagi hasil secara proporsional.

Selanjutnya, untuk variabel tingkat kemiskinan disajikan sebagaimana pada Tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7.** Distribusi Responden Petani Penggarap Menurut Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan	Jumlah	Persentase
>1,6 GK (Tidak Miskin)	59	14,90
1,0 – 1,6 GK (Rentan Miskin)	182	45,96
1,0 GK (Miskin)	155	39,14
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Dapat dilihat pada Tabel 7 di atas bahwa responden petani penggarap untuk kategori rentan miskin dan miskin adalah masing-masing 45,96 persen dan 19,14 persen dari 396 responden. Sementara yang tidak miskin atau yang lebih besar 1,6 GK hanya 14,90 persen. Ini menjelaskan bahwa responden petani penggarap lebih banyak yang berada pada kategori rentan miskin dan miskin.

**Hubungan Penguasaan Lahan Dan Pola Bagi Hasil Dengan Tingkat Kemiskinan Petani Penggarap**

Hasil analisis korelasi *Rank Spearman*, diperoleh keeratan hubungan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap sebagaimana disajikan dalam Tabel 8 berikut ini.



**Tabel 8.** Keeratan Hubungan Antara Penguasaan Lahan dan Pola Bagi Hasil Dengan Tingkat Kemiskinan Petani

Variabel yang diamati	Koefisien Korelasi (KK)	Keterangan
Hubungan antara penguasaan lahan dengan tingkat kemiskinan petani penggarap	0,664	Hubungan kedua variabel termasuk kategori kuat (tinggi), positif dan signifikan
Hubungan antara pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap	0,476	Hubungan keduanya termasuk kategori sedang, positif dan signifikan
Hubungan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap	0,721	Hubungan keduanya termasuk kategori kuat (tinggi), positif dan signifikan

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 8 tersebut di atas, terdapat hubungan yang erat antara penguasaan lahan dengan tingkat kemiskinan petani penggarap ( $\rho = 0,664$ ). Responden petani penggarap yang termasuk kategori miskin ( $\bar{1},0$  GK) cenderung didominasi oleh petani penggarap dengan skala penguasaan lahan sawah yang kecil atau sempit ( $\bar{0},50$  ha) yaitu 72,9%, kemudian berturut-turut skala menengah ( $0,50-0,99$  ha) yaitu 23,9% dan skala luas ( $\bar{1},00$  ha) yaitu 3,2%. Selanjutnya, bila dianalisis khusus petani penggarap yang termasuk kategori rentan miskin, ternyata didominasi oleh petani penggarap dengan penggunaan lahan skala menengah ( $0,50-0,99$  ha) yaitu 67,0%, kemudian berturut-turut adalah skala kecil ( $\bar{0},50$  ha) yaitu 19,8%, dan skala luas ( $\bar{1},00$  ha) yaitu 13,2%. Hanya sedikit petani penggarap yang termasuk kategori tidak miskin, dengan penguasaan lahan dominan skala luas ( $\bar{1},00$  ha) yaitu 79,7%, kemudian berturut-turut adalah skala menengah ( $0,50-0,99$  ha) yaitu 18,6% dan skala kecil ( $\bar{0},50$  ha) yaitu 1,7%.

Hasil penelitian ini, melengkapi hasil penelitian (Susilowati & Maulana, 2012) *therefore, is very important. This paper aims at analyzing the minimum requirements of farm land size and its break-even point (BEP*

yang menyatakan bahwa luasan lahan yang dibutuhkan per rumah tangga tani untuk memperoleh pendapatan setara atau di atas garis kemiskinan (GK) BPS adalah minimal  $0,71-1,10$  ha. Sementara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani penggarap yang menguasai lahan seluas  $0,71-1,10$  ha berada pada kategori rentang miskin.

Penguasaan lahan yang kecil atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali untuk digarap, menyebabkan sebagian besar petani dengan terpaksa menggarap lahan sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Fenomena pola bagi hasil yang dominan yaitu pola bagi hasil yang mendekati proporsional tersebut, tentunya tidak semata karena pertimbangan pendapatan. Fenomena tersebut diduga lebih banyak disebabkan oleh kesepakatan pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap didasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun di Kabupaten Maros. Penetapan kesepakatan pola bagi hasil dilakukan secara tidak tertulis, dan hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Dengan kondisi dan posisi petani penggarap yang lemah, maka penentuan kesepakatan pola bagi hasil tersebut lebih banyak ditentukan oleh pemilik lahan. Petani penggarap hanya menerima dan

melaksanakan kesepakatan bagi hasil tersebut. Begitu petani penggarap tidak menerima pola bagi hasil yang ditetapkan pemilik lahan, maka penguasaan lahan dialihkan kepada petani penggarap yang lain.

Oleh karena itu, petani penggarap tidak begitu bebas dan leluasa memilih pola bagi hasil yang akan diterapkan, meskipun pada dasarnya pola bagi hasil tersebut tidak menguntungkan dari segi pendapatan petani penggarap. Pola bagi hasil yang tidak menguntungkan dan bahkan bisa dikatakan sangat merugikan petani penggarap tersebut, pada akhirnya menjadikan petani penggarap sangat sulit untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Terkait hal ini, tentunya peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan, terutama dalam memfasilitasi penetapan pola bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap berupa instrumen dalam bentuk Peraturan Daerah.

Selanjutnya, terdapat hubungan yang kuat antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap di Kabupaten Maros ( $\rho = 0,721$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden petani penggarap yang tergolong miskin adalah kebanyakan petani penggarap dengan penguasaan lahan skala sempit (0,50 ha) dan menerapkan pola bagi hasil yang tidak proporsional atau pola bagi hasil yang mendekati proporsional. Sementara itu, responden petani penggarap yang tergolong rentan miskin pada umumnya didominasi oleh petani penggarap dengan penguasaan lahan skala menengah (0,50-0,99 ha) dan menerapkan pola bagi hasil yang mendekati proporsional. Selanjutnya, responden petani penggarap yang tergolong tidak miskin adalah petani penggarap dengan penguasaan lahan skala luas (1,00 ha) dan menerapkan pola bagi hasil yang mendekati proporsional atau pola bagi hasil yang proporsional.

Keberpihakan pemerintah dan pemerintah daerah melalui regulasi dan kebijakan yang

menguntungkan petani patut mendapat perhatian. Dalam pelaksanaannya di lapangan, petani penggarap perlu difasilitasi dan diberikan kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian, baik dalam bentuk hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Di samping itu, dengan posisi petani penggarap yang sangat lemah, perlu pengaturan dari pemerintah daerah terhadap pola bagi hasil yang diterapkan sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap.

Melalui penguasaan lahan dengan luasan yang layak dari segi usaha tani, ditambah pola bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, akan sangat membantu petani penggarap untuk bisa meningkatkan pendapatannya, dan pada akhirnya dapat menjadikan petani penggarap terbebas dari kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

Terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap. Dengan penguasaan lahan dan pola bagi hasil yang berlaku selama ini, ternyata kebanyakan petani penggarap di Kabupaten Maros berada pada kategori rentan miskin. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi dan kebijakan yang memungkinkan petani penggarap dengan kategori rentan miskin tersebut tidak menjadi miskin dengan pemanfaatan lahan yang tersedia, serta pola bagi hasil yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ala, A. (2012). *Secercah Harapan Buat Petani Gurem (dalam Gagasan, Pikiran, dan Harapan Alumni Fakultas Pertanian Unhas Terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia)*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.

- Arsyad, M. (2012). *Membangun Pertanian dan Perdesaan untuk Percepatan Reduksi Kemiskinan (dalam Gagasan, Pikiran, dan Harapan Alumni Fakultas Pertanian Unhas Terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia)*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Auliyah, R., & Wulandari, A. (2017). *Potret Bagi Hasil Pertanian*. Yogyakarta: Deepublish.
- BPS-Maros. (2017). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maros 2017*. Maros: BPS.
- BPS-Maros. (2019). *Kabupaten Maros dalam Angka 2019*. Maros: BPS.
- BPS. (2018a). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018b). *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018c). *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>
- Faisal, M. (2020). Land Conversion And The Level Of Community Social Cohesion In The Sub-District of Empoang District Binamu Jeneponto Regency. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25970>
- Ginting, J. (2004). *Analisis Faktor Penyebab Pendapatan Petani Miskin di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Medan*. Tesis. PPS Universitas Sumatera Utara.
- Handayani, S. M., Jamhari, Waluyati, L. R., & Mulyo, J. H. (2019). Contribution of Wetland Rice Agro Tourism to Household Income at Various Categories of. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/dx.doi.org/10.18196/agr.5173>
- Irmayanti. (2010). *Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap Usaha Tani Lahan Sawah di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros*. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin.
- Khomsan, A., Dharmawan, Saharuddin, Syarief, & Sukandar. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Manatar, Laoh, & Mandei. (2017). Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907-4298*, 13(1), 55–64. <https://doi.org/10.35791/agrsossek.13.1.2017.14920>
- Martono, N. (2010). *Statistik Sosial, Teori dan Aplikasi Program SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mokodongan, A., Rauf, R. A., & Laapo, A. (2016). Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usahatani Padi Sawah di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. *E-J. Agrotekbis*, 4(3), 310–315. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/242306>
- Mufti, M., & Zargustin, D. (2018). Penguasaan Lahan Usahatani Padi Sawah Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Jurnal Agribisnis*, 19(1), 26–32. <https://doi.org/10.31849/agr.v19i1.892>
- Priyadi, U., & Ash Shidiqie, S. J. (2015). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah studi di Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Millah, XV No 1*, 101–115. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>
- Soekartawi. (2006). *Analisis Usahatani*. Jakarta: UI-Press.

- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani : Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17–30. <https://doi.org/10.21082/akp.v10n1.2012.17-30>
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- Winarso, B. (2012). Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia (Pattern Dynamics Control Wetland in Rural Areas in Indonesia). *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 12(3), 137–149. Retrieved from <https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/view/209/175>
- Yamane, T. (1967). *Statistics: An Introductory Analysis* (Second Ed). New York: Harper and Row.